

Analisis Keberlanjutan Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan

Sri Mariati*, Adriana Klara Parera, Myrza Rahmanita

Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

*srimariati@stptrisakti.ac.id

Informasi Artikel

Received: 27 Juli 2022

Accepted: 29 Juli 2022

Published: 31 Juli 2022

Keywords:

Management Komodo
National Park, Sustainable
Tourism

Abstract

Komodo National Park, designated by UNESCO as a world heritage site, is the only place where the ancient species of Komodo dragon (Varanus komodoensis) lives., its savanna panorama, and beautiful underwater scenery, attract both domestic and foreign tourists. This research was conducted to analyze the management system of Komodo National Park. To find out and analyze the perception of the government and the community towards the development of Komodo National Park tourism and analyze the sustainability of the current Komodo National Park tourism development. This research method uses the McKinsey and GSTC Criteria and Indicators (2019). The results of the study show that the current management system of Komodo National Park is still not good because it does not have adequate human resources and has not yet achieved a strategic management system. The results of our study indicate that the government's perception of information on the development of the Komodo tourism area is well understood so that it is coordinated effectively. Effectively, for destination sustainability in KNP, management results are 93% (very good), socio-economic sustainability is obtained 62.5% (good enough), cultural sustainability is 31% (poor), and environmental sustainability is 52.3% (good enough).

Kata Kunci:

Pengelolaan Taman Nasional
Komodo, Pariwisata
Berkelanjutan

Abstrak

Taman Nasional Komodo, yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, adalah satu-satunya tempat hidup spesies purba komodo (*Varanus komodoensis*), panorama sabananya, dan pemandangan bawah laut yang indah, menarik wisatawan domestik dan asing. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengelolaan Taman Nasional Komodo. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo dan menganalisis keberlanjutan pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo saat ini. Metode penelitian ini menggunakan Kriteria dan Indikator McKinsey dan GSTC (2019). Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Taman Nasional Komodo saat ini masih kurang baik karena belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dan belum tercapainya sistem pengelolaan yang strategis. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa persepsi pemerintah terhadap informasi pengembangan kawasan wisata Komodo sudah dipahami dengan baik sehingga terkoordinasi secara efektif. Untuk keberlanjutan destinasi di TNK, hasil pengelolaannya 93% (sangat baik), keberlanjutan sosial ekonomi diperoleh 62,5% (cukup baik), keberlanjutan budaya 31% (buruk), dan kelestarian lingkungan 52,3% (cukup baik).

PENDAHULUAN

Tahun 2018, Indonesia masuk dalam Top 20 Destinasi Wisata dengan Pertumbuhan Terpesat di Dunia. Menurut The World Travel & Tourism Council, pariwisata Indonesia masuk dalam 10 besar dunia, di tingkat Asia menduduki peringkat ke-3 dan pertama di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan diakui secara global. Sektor pariwisata Indonesia 2018 menembus US\$ 16,426 miliar (Badan Pusat Statistik, 2020).

Langkah strategis telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan menerapkan kebijakan pariwisata nasional untuk 2010-2025 (Damanik et al, 2022). Pemerintah telah menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2021). Salah satunya adalah Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Berada di zona Taman Nasional Komodo- Ruteng dan KSPN Komodo dan sekitarnya. Secara geografis, Taman Nasional Komodo terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Idris et al, 2019).

Potensi wisata yang tinggi di kawasan Taman Nasional Komodo menjadikannya salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Nasional Komodo melalui promosi pesona wisata alam dan baharinya serta komodo sebagai daya tarik tersendiri bagi wisatawan (Subari et al, 2020).

Pemerintah juga mengadakan beberapa kegiatan untuk mendukung pariwisata seperti *Sail Komodo* pada tahun 2013 dan kemudian *Tour de Flores* pada tahun 2016 dan 2017 (Luru, 2018). Tidak hanya itu, Taman Nasional

Komodo termasuk dalam prioritas pembangunan nasional untuk tujuan wisata 10 program Bali Baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kehidupan dan Kehutanan. Namun, sejak tahun 1977, telah terjadi kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo saat ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dari UNESCO. Pada tahun 1980 kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kemudian pada tahun 1991, UNESCO menetapkannya sebagai salah satu Situs Warisan Dunia. Pada tahun 2011, Taman Nasional Komodo dinobatkan sebagai *The Real Wonder of The World*. Selanjutnya pada tahun 2012 ditetapkan sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Alam Baru. Ini adalah tonggak utama bagi Taman Nasional Komodo dalam kebangkitannya menjadi salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia. Berdasarkan data statistik Balai Taman Nasional Komodo pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir mencapai 221.203 wisatawan pada tahun 2019.

Keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, tidak sejalan dengan dampak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah ekonomi, sosial, budaya dan ekologi dapat mengganggu keberadaan dan keberadaan komodo dan habitatnya (Wahyuti et al., 2013).

Berbagai potensi dan permasalahan yang muncul dari pengembangan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu destinasi wisata prioritas di Indonesia, sangat penting untuk menentukan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat menjawab permasalahan di atas dan tentunya dapat mempertahankan keutuhan dan kelestarian Taman Nasional. Nasional Komodo. Menurut

Reihanian *et al.*, (2015) salah satu model pembangunan yang banyak dianut oleh hampir semua Taman Nasional dan hutan lindung saat ini adalah model pembangunan berkelanjutan. Ia bekerja dengan menentukan indikator keberlanjutan yang terukur. Hal ini juga disampaikan oleh Arsic, *et al* (2017) yang menekankan pentingnya strategi prioritas pembangunan berkelanjutan ekowisata di Taman Nasional Djerdap (NPDJ), sedangkan menurut Borchers (2002) menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan yang mendorong ekonomi berkelanjutan. tumbuh tanpa mengurangi keutuhan lingkungan, sosial, budaya dan alam. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana sistem pengelolaan Taman Nasional Komodo saat ini? (2) Bagaimana perkembangan pariwisata Taman Nasional Komodo menurut perspektif pemerintah dan masyarakat? (3) Seberapa berkelanjutan pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo saat ini?

TINJAUAN PUSTAKA

Kelembagaan

Kelembagaan merupakan faktor yang berperan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan taman nasional, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menjaga dan mengelola kelestarian taman nasional. Hal utama dalam organisasi berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi, seperti yang dikemukakan oleh (National Park Krueger, 2008).

Pola Kemitraan

Kemitraan adalah interaksi antar sektor dalam jangka waktu tertentu berdasarkan aturan dan norma yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa saling menghormati, akuntabilitas, komitmen, partisipasi, kepercayaan, saling menghormati, dan transparansi

(Weiler *et al.*, 2007). Keberhasilan kemitraan didefinisikan sebagai terbentuknya rasa saling percaya, resolusi konflik, kepuasan pemangku kepentingan, dan penguatan kapasitas organisasi untuk kerjasama jangka panjang (Weiler *et al.*, 2007).

Pola Keamanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengamanan adalah proses, cara, dan tindakan pengamanan. Jadi menjaga taman nasional adalah segala upaya termasuk proses, metode, dan tindakan untuk mengamankan kawasan Taman Nasional. Sementara itu, tujuan pengamanan adalah untuk sedapat mungkin menjaga kondisi yaitu (Ruschkowski & Mayer, 2011): (1) Tidak ada peluang atau peluang bagi lawan untuk berhasil melakukan spionase, sabotase, dan penggalangan dana; (2) Sejauh dapat dihindari atau diminimalkan kerugian pribadi, materi dan data sebagai akibat dari kelalaian, kelalaian dan bencana alam; (3) Terjadinya hal-hal yang merugikan upaya keamanan dapat dihindarkan.

Masyarakat sekitar dan Taman Nasional memiliki hubungan timbal balik (simbiosis mutualisme) satu sama lain seperti yang dikemukakan oleh Jarvis (2000). Namun, konflik kepentingan antara tujuan konservasi dan penggunaan lahan konvensional sering terjadi di kawasan Taman Nasional (Ruschkowski & Mayer, 2011).

Aspek Keberlanjutan Pariwisata

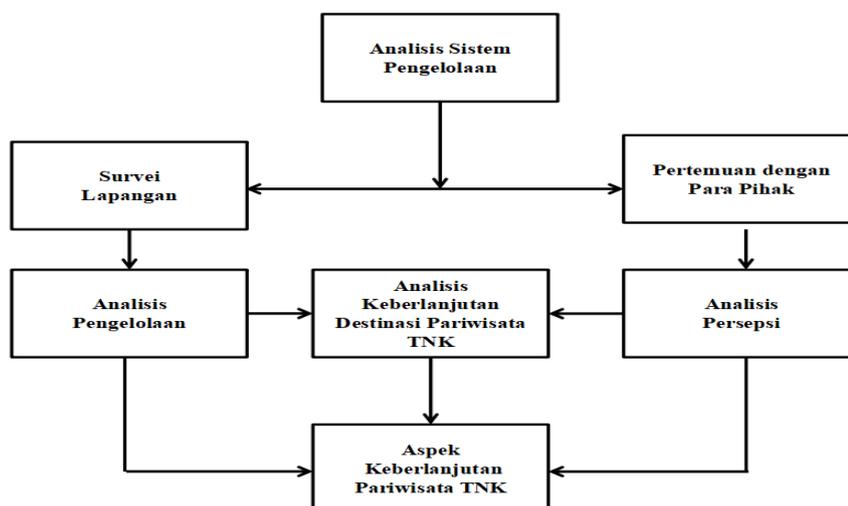
Taman Nasional sebagai destinasi wisata memerlukan aspek penilaian yang terstandar dan up-to-date untuk keberlanjutan di masa depan. Kriteria menurut *Global Sustainable Tourism Council* (2019) dibuat untuk memberikan pemahaman bersama tentang pariwisata berkelanjutan. Khusus untuk destinasi pariwisata, kriteria tersebut secara informal dikenal dengan istilah "GSTC-D" yang merupakan kriteria minimal

yang ingin dicapai oleh setiap destinasi pariwisata.

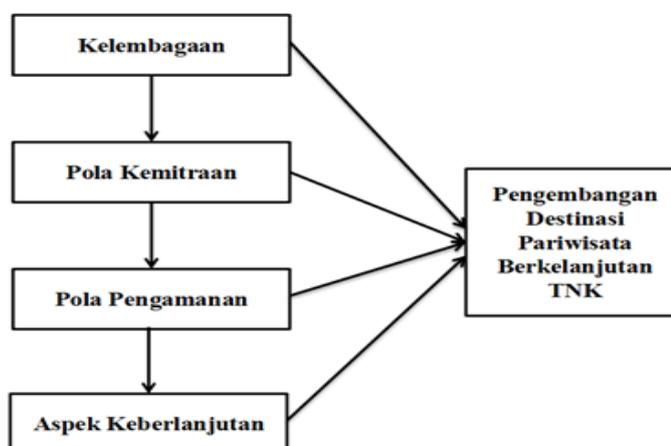
Tabel 1. Struktur Kriteria Pariwisata Berkelanjutan

<p>BAGIAN A: Pengelolaan Bekelanjutan</p> <p>A(a) Struktur dan Kerangka Pengelolaan A(b) Pelibatan Pemangku Kepentingan A(c) Mengelola Tekanan dan Perubahan</p>	<p>BAGIAN C: Bekelanjutan Budaya</p> <p>C(a) Pelindungan Warisan Budaya C(b) Mengunjungi Situs Budaya</p>
<p>BAGIAN B: Keberlanjutan Sosial Ekonomi</p> <p>B(a) Memberikan Manfaat Ekonomi Lokal B(b) Kesejahteraan dan Dampak Sosial</p>	<p>BAGIAN D: Berkelanjutan Lingkungan</p> <p>D(a) Konservasi Warisan Alam D(b) Pengelolaan Sumber Daya D(c) Pengelolaan Limbah dan Emisi</p>

Sumber: Global Sustainable Tourism Council (2019)



Gambar 1. Kerangka berpikir



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Sumber: Kruger National Park (2008); Weiler, et al (2007); Ruschkowski & Mayer (2011); *Global Sustainable Tourism Council* (2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian survei yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka, observasi, survei, dan wawancara mendalam. Wawancara ini termasuk diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan. Pertanyaan terkait dengan pihak dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan mengambil 45 responden kunci yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat setempat. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, menganalisis sistem pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo menggunakan analisis efektivitas McKinsey 7-S, menganalisis perspektif pemerintah dan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata di Taman Nasional Komodo menggunakan analisis deskriptif analitis dan menganalisis keberlanjutan pengelolaan Taman Nasional Komodo menggunakan analisis Kriteria dan Indikator (*Global Sustainable Tourism Council*, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengelolaan Taman Nasional Komodo Institusi TNK

Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia saat ini dikelola oleh Balai Taman Nasional terkait di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan taman nasional tidak terlepas dari faktor kelembagaan yaitu, (1) kemampuan mengelola dan memelihara taman nasional dan; (2) Pemanfaatan sumber daya manusia. BTNK dipimpin oleh seorang kepala balai dan seorang kepala subbagian tata usaha. Pengelolaannya dibagi menjadi 3 wilayah kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Pemerintah pusat sangat concern terhadap peningkatan SDM staf pengelola TNK, hal ini dibuktikan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk belanja SDM yang lebih besar dibandingkan belanja lainnya. Pada tahun 2020, anggarannya sebesar Rp. 22,94 miliar (termasuk belanja pegawai) untuk mengelola 173.300 ha atau setara dengan Rp. 132.387/ha. Sumber: Balai Taman Nasional Komodo dengan realisasi hingga September 2020.

Tingkat pendidikan staf di Balai Taman Nasional Komodo masih bervariasi dari SD hingga S2 dalam 6 tahun terakhir yaitu 2015-2020. Tingkat pendidikan SD-SLTP sebagai jenjang pendidikan terendah masih berkisar 0-5 orang, sedangkan untuk SLTA paling banyak yaitu 0-85 orang. Ada juga lulusan D3 sekitar 0-10 orang, dan lulusan S1 0-15 orang. Jenjang magister merupakan jenjang pendidikan tertinggi, tenaga kerja di BTNK hingga tahun 2020 berkisar 0-20 orang. Ada dua rencana pengembangan kawasan TNK terkait dengan sistem pengelolaan TNK, yaitu pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seperti pembangunan Geopark di Loh Buaya, Pulau Rinca, dan dermaga dan kawasan kuliner di Pulau Padar. Proyek-proyek tersebut dibangun oleh pemerintah dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

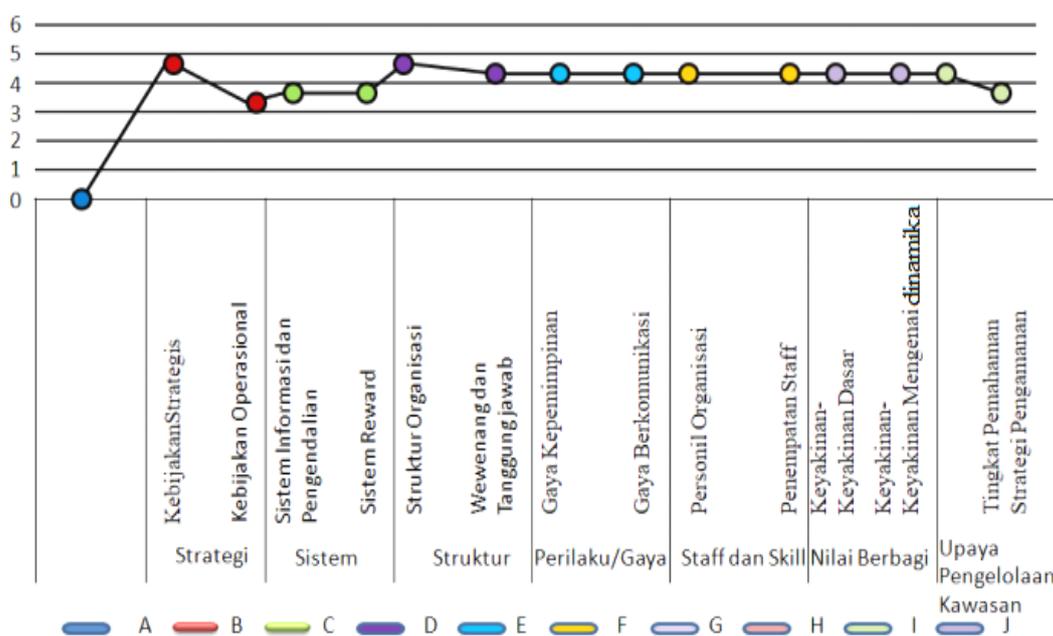
Pola Kemitraan TNK

Sejak tahun 1995 pengelolaan Taman Nasional Komodo dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemangku kepentingan utama termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, komponen masyarakat, dan lembaga swasta. Mekanisme pengelolaan kegiatan wisata alam di Kawasan Pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama ini, berupa Penyediaan Sarpras oleh Pemerintah di Ruang Publik, Zona Pemanfaatan. Penyediaan infrastruktur oleh pelaku usaha di Ruang Usaha, Zona

Pemanfaatan melalui Izin Usaha Penyediaan Fasilitas Wisata Alam (IUPSWA). Pemberian Jasa Wisata oleh Masyarakat/Pelaku Usaha di Kawasan Pemanfaatan melalui Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk Balai Taman

Nasional Komodo pada tahun 2020 sebesar Rp 22,94 miliar (termasuk belanja pegawai) untuk mengelola 173.300 ha atau setara dengan Rp 132.387/ha. Hasil pengukuran faktor dominan dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo dapat dilihat pada sebaran skala likers berikut ini:

SEBARAN SKALA LIKERT PADA FAKTOR DOMINAN



Gambar 3. Distribusi Skala Likert pada Faktor Dominan
(Sumber: Proses Peneliti 2021)

Hasil analisis menggunakan skala Likerts menunjukkan bahwa nilai indeks rata-rata adalah strategi, yang meliputi tindakan terkoordinasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan TNK, yang terdiri dari kebijakan operasional dengan nilai indeks rata-rata 3,0 dan kebijakan strategis, dengan indeks rata-rata nilai. Rata-rata adalah 4,4. Urutan kedua adalah sistem, termasuk prosedur/proses; terdiri dari sistem penghargaan dengan nilai indeks rata-rata 3,5 dan sistem informasi, dengan nilai indeks rata-rata 3,8. Urutan ketiga adalah upaya pengelolaan konservasi, meliputi tingkat pemahaman strategi pengamanan, tingkat konservasi keanekaragaman hayati, dan tingkat

negosiasi dan lobi untuk penggalangan dana dari pihak luar, yang terendah sebesar 3,8.

Pola Keamanan KNP

Dalam pengelolaan konservasi Taman Nasional Komodo, digunakan lima prinsip dalam menjaganya, yaitu: Berbasis Regulasi. Prinsip-prinsip pengelolaan taman nasional diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan, keputusan direktur jenderal PHKA dan KSDAE serta perjanjian kerjasama. Peraturan berbasis ilmiah didasarkan pada ilmu sejarah dan perilaku komodo. Ada juga peraturan Berbasis Bukti dan Berbasis Pengalaman. Perhitungan populasi komodo dilakukan dengan pemantauan

populasi komodo di Taman Nasional Komodo yang dilakukan dengan Metode Mark Recapture; dan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, prinsip kehati-hatian; Berdasarkan pengamatan digunakan untuk menghitung jumlah komodo yang sering berkeliaran di sekitar kawasan Taman Nasional Komodo.

Analisis Pengembangan Wisata TNK Berdasarkan Persepsi Pemerintah dan Masyarakat

Pengembangan wisata TNK berdasarkan persepsi pemerintah, berdasarkan hasil penelitian (data responden), pemahaman dan pengetahuan tentang tujuan dan visi serta misi terkait pengelolaan TNK oleh seluruh aparat pemerintah terkait ditemukan menjadi hal utama dalam pembangunan TNK. Selain itu, informasi mengenai perkembangan kawasan wisata Komodo juga dipahami dengan baik, sehingga terkoordinasi secara efektif. Hal ini terlihat dari koordinasi dengan instansi lokal dalam rencana pengembangan Pulau Rinca dan juga monitoring dan evaluasi bersama kawasan TNK.

Pengembangan wisata TNK berdasarkan persepsi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian, keberadaan TNK secara positif telah memberikan banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum masyarakat setempat mengatakan bahwa ada dua dampak yang sangat dominan terhadap keberadaan TNK, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pemahaman bahwa komodo adalah kerabat dari masyarakat adat setempat menjadi dasar kecintaan mereka untuk merawat dan melindungi satwa purba ini dan lingkungannya. Sementara pembangunan TNK meresahkan masyarakat setempat, sistem zonasi membatasi ruang gerak, dan distribusi pendapatan pariwisata masih terpusat dan tidak berpihak pada masyarakat.

Analisis Keberlanjutan Pengembangan Wisata TNK Saat Ini

Agar pembangunan TNK dapat berkelanjutan, idealnya manfaatnya harus lestari dan terpelihara secara berkesinambungan. Kriteria dan Indikator *Global Sustainable Tourism Council* (2019) menempatkan 4 kriteria dasar dalam pengembangan destinasi pariwisata, yaitu manajemen berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, kelestarian budaya dan ketahanan lingkungan.

Institusi TNK

Jumlah pegawai tersebut tidak seimbang karena kondisi tahun 2020 sebanyak 126 pegawai mengelola 173.300 Ha atau setara dengan 1 pegawai pengelola 1.375,4 Ha. 50% dari staf dinaturalisasi dari masyarakat setempat. Tingkat pendidikan masih memiliki tenaga pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP). Dan hampir sebagian besar dari mereka memiliki ijazah SMA, yaitu sekitar 80%. Hal ini membuktikan belum memadainya sumber daya manusia bagi staf kelembagaan. Ada dua rencana pengembangan kawasan TNK terkait dengan sistem pengelolaan TNK, yaitu pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seperti pembangunan Geopark di Loh Buaya, Pulau Rinca, dan dermaga dan kawasan kuliner di Pulau Padar. Proyek-proyek tersebut dibangun oleh pemerintah dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Menurut Krueger National Park (2008), sebuah lembaga pengelola akan berjalan secara optimal jika sumber daya manusianya memenuhi salah satu gagasan utama, yaitu terdidik dan berpengalaman. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, masih banyak pegawai yang berpendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP). sekitar 80% dari total staf memiliki ijazah sekolah menengah. Hal ini membuktikan minimnya SDM aparatur kelembagaan

yang memiliki peran utama dalam mengelola TNK sebagai situs cagar budaya dan destinasi wisata premium saat ini.

Instansi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) saat ini sedang membangun infrastruktur dan preservasi jalan baru, meningkatkan kualitas pelayanan jalan melalui penataan kawasan pejalan kaki dan membangun trotoar berkualitas premium serta menghubungkan jalan dengan daerah lain dengan Labuan Bajo. Ada juga pengembangan oleh pihak swasta yang meliputi pengembangan spasial, dan pengembangan non-spasial terkait rencana penataan baru beberapa destinasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo sebagai penunjang pariwisata Komodo.

Pola Kemitraan TNK

Mekanisme pengelolaan kegiatan wisata alam di Kawasan Pemanfaatan Taman Nasional Komodo dilakukan melalui kerjasama semua pihak yang berpartisipasi. Anggaran pembangunan tidak hanya diperoleh dari pemerintah tetapi juga kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Segera Komodo untuk Pulau Rinca dan PT. Ekowisata Satwa Komodo untuk Pulau Komodo dan Padar. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum perusahaan-perusahaan swasta ini telah diakui secara hukum, mereka belum dapat beroperasi secara optimal karena penolakan dari masyarakat setempat.

Tiga urutan terbawah menunjukkan bahwa faktor dominan dalam pengelolaan TNK adalah kelemahan strategi kebijakan operasional pengelolaan sumber daya TNK. Oleh karena itu, diperlukan sistem prosedur/proses dan informasi yang baik serta upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di TNK. Jika dibandingkan dengan faktor dominan

pengelolaan Taman Nasional Kutai. Hasil penelitian yang dilakukan Prakoso (2014) menunjukkan bahwa perilaku atau gaya yang menggambarkan perilaku pengelolaan dan metode organisasi untuk mencapai tujuan pengelolaan Taman Nasional Kutai dengan indeks rata-rata untuk gaya kepemimpinan sebesar 4,7 dan indeks rata-rata 4,7. Gaya komunikasi rata-rata adalah 4,7. Menurut Tadjudin (2000) bahwa pengelolaan suatu kawasan Taman Nasional yang bersistemkan kolaborasi, minimal terdapat empat pihak yang saling berinteraksi dan memiliki hak dan tujuan individual yang berbeda.

Pola Keamanan KNP

Pengelolaan Taman Nasional Komodo berdasarkan kelima prinsip tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan dan reproduksi komodo. Populasi komodo di Loh Lembah Buaya relatif stabil, bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah komodo pada tahun 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.022 individu (meningkat 125 individu). Populasi terutama terkonsentrasi di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Hanya 7 individu yang hidup di Pulau Padar, 69 individu di Gili Motang, dan 91 individu di Nusa Kode. Populasi komodo di Loh Lembah Buaya adalah 5% dari populasi di Pulau Rinca atau sekitar 66 individu. Bahkan populasi komodo di Loh Lembah Buaya selama 17 tahun terakhir relatif stabil dengan tren yang sedikit meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan Wisata TNK Berdasarkan Persepsi Pemerintah

Pemahaman yang baik oleh pemerintah pusat dan daerah mengenai aspek ekologi atau lingkungan TNK. Dari 10 responden yang terlibat dalam FGD dan wawancara, semua (100%) mengerti dan tahu tentang konservasi, zonasi, dan demarkasi kawasan taman nasional dan perlindungan satwa liar

termasuk komodo. Keberadaan TNK berdampak pada peningkatan perekonomian negara sebesar RP. 38,000.813.500 pada tahun 2019, untuk mampu menggerakkan perekonomian pemerintah kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 533,3 Miliar (sampai September 2019). Hal ini telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, dimana 50% staf BTNK adalah naturalis. Di sisi lain, masih dibahas pembagian hasil pariwisata kepada pemerintah pusat dan daerah demi pemerataan pembangunan karena selama ini masih terpusat.

Pengembangan Wisata TNK Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Banyaknya pandangan positif di sekitar TNK telah memberikan banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Positif terhadap TNK telah memberikan banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan kecintaan masyarakat setempat terhadap komodo yang sudah dianggap keluarga. Meski masih terdapat dampak negatif pembangunan di TNK, masyarakat tetap berharap pariwisata tetap berbasis masyarakat, jangan sampai masyarakat terpinggirkan, dan pembangunan harus tetap berpusat pada manusia. Konservasionis harus berasal dari masyarakat dan tidak dipaksakan. Selain itu, hal utama dalam pembangunan adalah penyelamatan komodo. Oleh karena itu, langkah-langkah harus dipisahkan agar tidak mengganggu konservasi. Aspek pembangunan berkelanjutan TNK di masa depan adalah menggabungkan praktik konservasi dengan pengentasan kemiskinan untuk membantu masyarakat lokal menerima program konservasi dan memastikan keberlanjutan konservasi kawasan TNK (Balint (2006).

Analisis Keberlanjutan Pengembangan Wisata TNK Saat Ini

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria dan indikator Destinasi Lestari Taman Nasional Komodo dapat diringkas sebagai berikut: (1) Kriteria pengelolaan TNK berkelanjutan bagian A: dari 11 subkriteria dan 56 indikator, 52 indikator terpenuhi dan 4 indikator belum terpenuhi atau persentase capaiannya adalah 92,86% atau 93%, artinya pengelolaan berkelanjutan Komodo Nasional Taman sangat bagus; (2) Kriteria keberlanjutan sosial ekonomi bagian B: dari 8 subkriteria dan 32 indikator, terdapat 20 indikator yang terpenuhi dan 12 indikator yang tidak terpenuhi, atau persentase capaian yang memenuhi kriteria dan indikator GSTC (2019) adalah 62,5% yang artinya untuk keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat termasuk dalam kategori cukup baik, dan perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengembangan destinasi wisata unggulan di Taman Nasional Komodo; (3) Kriteria kelestarian budaya bagian C: dari 7 subkriteria dan 26 indikator, 8 indikator terpenuhi dan 18 belum terpenuhi atau 30,76% atau 31%, artinya pengembangan destinasi wisata premium di Taman Nasional Komodo tidak memperhatikan terhadap kelestarian budaya, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi agar budaya asli masyarakat Komodo dapat dilestarikan dan dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Taman Nasional Komodo; (5) Kriteria kelestarian lingkungan bagian D, dari 12 subkriteria dan 65 indikator terdapat 34 indikator terpenuhi dan 31 indikator belum terpenuhi untuk masing-masing indikator atau 52,3% yang artinya kelestarian lingkungan di destinasi wisata premium Taman Nasional Komodo sudah cukup baik, namun harus ditingkatkan lagi menjadi baik dan sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan menggunakan GSTC Tujuan Destinasi berkelanjutan, aspek

pengelolaan Taman Nasional Komodo mendapat nilai paling baik sebesar 93% yang artinya mendapatkan skor atau nilai sangat baik, sedangkan yang paling kecil nilai yang diperoleh pada aspek budaya yaitu 31%, artinya bernilai buruk. Hal ini jika dilihat dari pengelolaan saat ini, pemerintah lebih menekankan pada aspek pengelolaan, social ekonomi, dan kelestarian lingkungan, tetapi belum terhadap aspek keberlanjutan budaya. Bentuk pembangunan (*Grand design*) TN tetap berdasarkan asas konservasi berbasis masyarakat. Pola pengelolaan kawasan konservasi yang baik adalah pola pengelolaan yang harus mempertimbangkan kawasan yang lebih luas yang mencakup ekosistem dan segala isisnya serta manusia yang ada di dalamnya (Mariati 2013). Pentingnya pariwisata berkelanjutan yang mendorong kelangsungan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan integritas lingkungan, sosial, budaya dan alam (Borchers, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem pengelolaan Taman Nasional Komodo saat ini masih belum cukup baik karena tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan pendanaan yang lebih sedikit dari sebelumnya, sedangkan kebutuhan akan pemantauan, patroli, dan pengayaan habitat terus meningkat. Hasil analisis persepsi pemerintah bahwa informasi mengenai pengembangan kawasan wisata Komodo dipahami dengan baik, yang membantu pemerintah mengkoordinasikan upayanya secara efektif. Hal ini terlihat dari koordinasi dengan instansi lokal dalam rencana pengembangan pulau Rinca serta monitoring dan evaluasi bersama kawasan TNK, sedangkan hasil persepsi masyarakat bahwa pemahaman bahwa komodo adalah kerabat dari masyarakat adat setempat merupakan dasar cinta mereka untuk merawat dan melindungi hewan purba ini dan lingkungannya.

Hasil analisis aspek keberlanjutan pengembangan destinasi wisata premium di Taman Nasional Komodo adalah untuk pengelolaan berkelanjutan mendapatkan 93% (sangat baik), keberlanjutan sosial ekonomi mendapatkan 62,5% (cukup baik), keberlanjutan budaya 31% (buruk), dan kelestarian lingkungan 52,3% (cukup baik), secara keseluruhan memenuhi kriteria dan indikator sebagai destinasi berkelanjutan dikategorikan cukup baik.

Saran

Pemerintah diharapkan meningkatkan standar pendidikan bagi staf pengelola Taman Nasional Komodo serta masyarakat lokal untuk menciptakan sumber daya manusia yang memadai. Standarisasi anggaran pemerintah yang memadai dan memadai untuk kelancaran pengelolaan Taman Nasional Komodo. Menggalakkan program pelestarian budaya khususnya budaya lokal di TNK sebagai wadah untuk mengenal dan mencintai budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsic, S., Nikolić, D., dan Ivkovi., (2017). Model hybrid SWOT-ANP-FANP untuk strategi prioritas pengembangan ekowisata berkelanjutan di Taman Nasional Djerdap, Serbia. *Forest Policy and Economics*,80: 11-26.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Devisa Sektor Pariwisata. Diakses Pada 28 Desember 2021, dari https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1160/sdg_s_8/1
- Balint, P. J. (2006). Improving Community-Based Conservation Near Protected Areas: The Importance of Development Variables. *Environmental Management Journal*, 38(1): 137-148.

- Borchers, H. (2002). Ekowisata sebagai strategi konservasi di Taman Nasional Komodo, Indonesia. *Conference Contesting Development: Pathways to Better Practice, 3rd Biennial Conference of the International Development Studies Network of Aotearoa New Zealand, Massey University, Palmerston North*: 3-5.
- Damanik., Nasrullah, B., Purba, A., SN, A., Abdillah, D., Raditya., Salim, M. N., Hamidah, S., Rusata, T., & Faried, A. I. (2022) *Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Global Sustainable Tourism Council (2019). *Indikator Kinerja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Washington DC: The Global Sustainable Tourism Council.
- Idris, M. H., Selva., Destari, R. (2019). Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1): 56-68.
- Jarvis, T. D. (2000). *Tanggung Jawab Taman Nasional Dalam Pembangunan Pedesaan di Taman Nasional dan Pembangunan Pedesaan*. Washington, DC: Island Press..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Pengamanan*. Diakses Pada 21 Desember 2022, dari <https://kbbi.web.id>.
- Kruger National Park. (2008). *South African National Park Management Plan*. Limpopo & Mpumalanga: Kruger National Park
- Luru, M. N. (2018). Identifikasi Pengembangan Produk Pariwisata Perkotaan (Studi Kasus Kota Labuan Bajo). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 23(2): 115-131.
- Mariati, S. (2013). Harmonisasi Ruang antara Produksi dan Konservasi di Suatu Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kawasan Hutan tesso Nilo , Riau, Sumatera). *Disertasi* . Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2021 Tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025*.
- Prakoso, B. (2014). *Model Pengelolaan Taman Nasional yang Berkelanjutan Berbasis Kerjasama Sipil-Militer*. *Disertasi*. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana.Universitas Indonesia. Jakarta.
- Reihanian, A., Hin, T.W., Kahrom, E., Mahmood, N. Z. B. (2015). A framework for implementing sustainable tourism in national parks of Iran: development and use of sustainable tourism indicators in Boujagh National Park, Iran. *Caspian J. Env. Sci*, 13(1): 41-52.
- Ruschkowski, E.V., dan Mayer, M. (2011). From Conflict to Partnership? Interactions Between Protected Areas, Local Communities and Operators of Tourism Enterprises in Two German National Park Regions. *Journal of Tourism and Leisure Studies*, 17(2): 147-181.
- Tadjudin, D. (2000). *Manajemen Kolaborasi*. Bogor: Pustaka Latin.
- Wahyuti, E., Wibowo, T., Iriyono , S., Syari'fuAhdin , I., Kurniawan, M., Adnan, A., Indriasari, D., Buaihi, D., Priska, M.W. (2013). *Kajian Peranan Taman Nasional Komodo dalam perekonomian Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus pengembangan*

- Aspek Pemanfaatan Ekowisata).
Labuan Bajo: Balai Taman
Nasional Komodo.*
- Weiler, B., Laing, J., dan Moore, S.A.
(2007). *Developing Effective
Partnerships for Facilitating
Sustainable Tourism Associated
with Protected Areas*. Canada:
Murdoch University.
- Subari, S. S. (2020). Nilai Penting dan
Strategis Nasional Rencana
Zonasi Kawasan Taman Nasional
Komodo. *Jurnal Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan*, 1(1):15.